

BAB IV

HASIL TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan tentang (a) deskripsi lokasi penelitian, (b) deskripsi hasil penelitian dan (c) pembahasan hasil penelitian.

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Kabupaten Barito Kuala (Batola) dengan ibukotanya Marabahan adalah salah satu dari 13 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten ini terletak pada batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara berbatasan dengan provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa;

Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin;

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kapuas.

Kabupaten Barito Kuala terdiri dari 17 kecamatan, yaitu Kecamatan Marabahan, Kuripan, Tabukan, Bakumpai, Kecamatan Cerbon, Kecamatan Rantau Badauh, Mandastana, Jejangkit, Alalak, Berambai, Belawang, Wanaraya, Anjir Muara, Anjir Pasar, Tamban, Mekarsari, dan Kecamatan Tabunganen

Penduduk Kabupaten Barito Kuala seluruhnya berjumlah 275.143 jiwa, terdiri dari 72.282 kepala keluarga.

Lembaga-lembaga pendidikan yang ada di kabupaten ini adalah TK sampai perguruan tinggi, sebagaimana dikemukakan dalam tabel:

Tabel 1: Lembaga Pendidikan dan Jumlah Murid di Kabupaten Barito Kuala

No	Lembaga pendidikan	Status		Jumlah sekolah	Jumlah murid
		Negeri	Swasta		
1	TK	2	142	144	683
2	SD	269	2	271	1715
3	SMP	51	4	55	6599
4	SMA	14	1	15	3135
5	SMK	2	-	2	730
6	MI	10	47	57	5270
7	MTs	6	31	37	4516
8	MA	5	14	19	2459

Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala 2010, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala 2010.

Di samping itu ada satu Perguruan Tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Marabahan.

Adapun jumlah tenaga kependidikannya dikemukakan dalam table berikut:

Tabel 2: Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala

No	Lembaga pendidikan	Status		Jumlah
		PNS	Honorer	
1	TK	101	332	433
2	SD	1240	643	1883
3	SMP	585	138	723
4	SMA	210	92	302
5	SMK	67	9	76
6	TU SMA	24	39	63
7	TU SMK	5	14	19
8	Jumlah	2232	1267	3499

Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala, 2010, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala, 2010.

Tabel 3: Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala

No	Lembaga pendidikan	Status		Jumlah
		PNS	Honorer	
1	RA	-	106	106
2	MI	170	411	581
3	MTs	149	513	662
4	MA	121	235	356
5	TU	1	15	16
	Jumlah	440	1280	1720

Sumber data: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala, 2010.

Tampak bahwa tenaga kependidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala jauh lebih banyak dibandingkan dengan di lingkungan Kementerian Agama. Di samping itu tenaga kependidikan di lingkungan Dinas Pendidikan lebih banyak berstatus PNS, sedangkan di lingkungan Kementerian Agama lebih banyak yang berstatus honorer.

B. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Pengembangan sumber daya pendidikan dalam kebijakan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala memiliki sejumlah kebijakan di bidang pendidikan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia pada masyarakat di daerah. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemerintah Kabupaten Barito Kuala melalui Dinas Pendidikan setempat proaktif mendorong dan membantu para guru bidang studi untuk mendalami bidang studinya masing-masing. Bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang belum mencapai tingkat strata satu (S 1) agar segera

menuntaskan pendidikannya sampai S 1, dan bagi guru SMP/MTs dan SMA/MA agar dapat melanjutkan pendidikan S 2, baik di Banjarmasin seperti IAIN Antasari, Unlam, UNISKA dan STKIP PGRI, maupun pada perguruan tinggi (PT) di Jawa seperti Universitas Negeri Malang (dulu IKIP Malang), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung dan sebagainya.

Anggaran dana pendidikan Kabupaten Barito Kuala pada tahun anggaran 2011 mencakup gaji guru, pegawai Dinas Pendidikan dan tunjangan daerah secara keseluruhan berjumlah Rp 168.876.001.006,-. Selain anggaran tersebut juga dialokasikan dana untuk program pendidikan dasar Rp 21.996.216.840,-, pendidikan menengah Rp 11.119.989.250,-, pendidikan nonformal Rp 1.104.467.400,-. Program pelatihan dan kursus-kursus bagi tenaga pendidik dan kependidikan Rp Rp 1.973.467.480,-, peningkatan kualifikasi guru untuk menempuh Strata 1 Rp 961.800.000,-. Total anggaran pendidikan Rp 206.031.941.976,-. (dua ratus enam miliar tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).

Sesuai anggaran yang tersedia pemerintah daerah berusaha membantu biaya pendidikan bagi guru-guru yang ingin meningkatkan kualifikasinya.. Bagi guru yang belum memperoleh sertifikasi, maka biaya pendidikan untuk melanjutkan ke jenjang S 1 dan S 2 itu secara penuh dibiayai oleh pemerintah daerah. Sedangkan bagi guru yang sudah beroleh sertifikasi, maka disuruh untuk melanjutkan pendidikannya dengan biaya sendiri (mandiri) karena penghasilannya sudah dianggap lebih.

Kebijakan dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk melanjutkan pendidikan di sini terbagi:

Pertama, Izin belajar. Bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala berkeinginan meningkatkan jenjang pendidikan diberikan kesempatan seluas-luasnya dengan tetap mengacu kepada ketentuan / persyaratan yang berlaku. Lembaga pendidikan yang dipilih harus legal dan mendapat izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional, dan perkuliahannya di luar jam kerja. Persyaratannya di antaranya surat permohonan yang bersangkutan, surat pengantar instansi tempat kerja, rekomendasi dari pimpinan instansi, surat pernyataan memenuhi ketentuan, surat keterangan dari lembaga pendidikan yang bersangkutan, daftar mata kuliah, ijazah dan pangkat terakhir, daftar riwayat hidup dan daftar riwayat pekerjaan.

Izin belajar dapat ditempuh oleh para guru dengan menjalani pendidikan lanjutan, misalnya S 1 dan S 2 di Banjarmasin. Mereka masih menjalankan tugasnya sehari-hari, jadi kuliahnya adalah di luar jam kerja. Pada izin belajar ini biaya pendidikan ditanggung sendiri oleh guru atau tenaga kependidikan bersangkutan, namun Pemerintah Kabupaten Barito Kuala ikut membantu, baik di segi perizinan maupun membantu biaya, misalnya biaya menyusun skripsi/tesis, biaya penelitian, biaya ujian dan sebagainya. Hal ini memerlukan pula usaha dari guru atau tenaga kependidikan bersangkutan. Mereka yang mengikutinya tidak disyaratkan harus menyelesaikan kuliahnya pada masa tertentu. Pada izin belajar ini tidak semua guru

dan tenaga kependidikan memiliki kuliah pada jurusan yang sesuai dengan profesinya.

Kedua, Tugas belajar. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala memberikan kesempatan kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan diploma, S 1 dan S2 dengan status mahasiswa tugas belajar (MTB). Kalau izin belajar yang bersangkutan masih menjalankan tugas sehari-hari, maka tugas belajar dibebaskan dari tugas selama pendidikan berlangsung. Di antara persyaratannya, perguruan tinggi tempat kuliah dan jurusan harus sesuai dengan profesi. Mereka ini biasanya memilih tugas belajar ke luar daerah (Jawa) dan ada juga di Banjarmasin. Masa belajarnya juga dibatasi sesuai ketentuan, misalnya hanya 2 tahun untuk program S 2 dan jika lebih maka selebihnya menjadi kewajiban yang bersangkutan untuk membiayai perkuliahannya. Mereka dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah daerah, dengan persyaratan adalah bersedia mengabdikan kembali di lingkungan kabupaten Barito Kuala sekembalinya dari tugas belajar minimal selama 5 tahun.

Biaya tugas belajar tersebut ditanggung oleh pemerintah pusat (Departemen Pendidikan Nasional) diukur dengan biaya hidup di ibukota Jakarta. Karena itu tidak jarang biaya itu berlebih sampai Rp 1,5 juta per bulan dan kelebihan itu dikembalikan lagi kepada peserta bersangkutan.

Target pemerintah Barito Kuala sebelum tahun 2015 semua guru sudah harus berpendidikan S 1. Saat ini (2010) jumlah guru yang sudah menyelesaikan pendidikan S 1 sebanyak 272 orang, yang sedang menjalani pendidikan S 1 sebanyak 186 orang, yang menyelesaikan pendidikan S 2 sebanyak 10 orang dan S 3 sebanyak

1 orang. Tenaga kependidikan yang sudah menyelesaikan pendidikan sesuai dengan bidangnya sebanyak 45 orang, Sedangkan untuk pendidikan perjenjangan, pada tahun 2010 dan 2011 masing-masing sudah mengikuti 2 orang dan 3 orang. Pendidikan S 1 dan S 2 terus digalakkan untuk guru, karena terbukti setelah menyelesaikan pendidikannya, kompetensi mereka, khususnya kompetensi pedagogik dan profesionalnya dapat terpenuhi.

Pendidikan dan pelatihan (diklat) diberikan pula kesempatannya kepada guru dan tenaga kependidikan. Kepada tenaga pendidik dan kependidikan diberikan diikutsertakan dalam diklat kepemimpinan perjenjangan, yaitu mengikuti diklat Adum, dan Diklatpim tingkat IV, III, II dan I yang dilaksanakan di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Banjarbaru.

Tujuan mengikuti diklat adalah dalam rangka menambah pengetahuan, keterampilan dan wawasan dalam bidang kerjanya. Bagi setiap badan, dinas, kantor, bagian dan unit kerja lainnya yang bermaksud mengikuti pendidikan dan pelatihan, baik di dalam maupun di luar daerah harus melalui satu pintu, hal ini dimaksudkan agar setiap pendidikan dan pelatihan yang diikuti akan membawa daya guna dan hasil guna bagi tempat tugasnya. Persyaratan untuk mengikuti diklat ini di antaranya adalah pendidikan dan pelatihan yang diikuti sebelumnya telah diprogramkan oleh unit kerja masing-masing, surat permohonan yang ditujukan kepada bupati dan kepala dinas, surat telex penawaran dari lembaga penyelenggara diklat (surat penawaran tersebut bukan dari lembaga swasta), dan surat permohonan mengikuti kegiatan diklat minimal 5 hari sebelum diklat dilaksanakan.

Bagi guru dan tenaga kependidikan yang telah mengikuti pendidikan dan diklat, maka baginya berhak untuk mencantumkan gelar akademik. Artinya, bagi yang di masa tugasnya melanjutkan pendidikan formal dengan biaya dinas dan/atau biaya sendiri dan beroleh gelar kesarjanaan tertentu, diperbolehkan mencantumkan gelar akademiknya, dengan persyaratan surat izin belajar dan/ atau tugas belajar, ijazah pendidikan terakhir yang dijalani, transkripsi nilai pada ijazah tersebut, SK pangkat dan jabatan terakhir serta surat pengantar dari instansi bersangkutan.

Selanjutnya kepada mereka juga diberikan hak untuk mendapatkan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. Bagi PNS yang telah memiliki ijazah yang lebih tinggi dan pangkatnya masih di bawah yang seharusnya, dapat mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah (UKPPI) secara berjenjang sesuai dengan formasi yang tersedia. Di antara persyaratannya adalah pengantar daftar nominatif calon peserta ujian penyesuaian ijazah, surat izin belajar dan ijazah terakhir yang akan disesuaikan.

Di samping itu Pemerintah Kabupaten Barito Kuala juga berupaya memberikan insentif kepada para guru, berupa tunjangan daerah yang diberikan setiap bulan bersama gaji rutin. Untuk Kepala SD diberikan tunjangan Rp 525.000,- per bulan, kepala SMP Rp 600.000,- per bulan, kepala SMA/SMK Rp 675.000,- per bulan, dan untuk kepala TK Rp 450.000,- per bulan. Untuk guru-guru PNS golongan II – golongan IV besar tunjangan daerah Rp Rp 300.000,- per bulan. Selanjutnya para guru honorer juga diberikan gaji oleh daerah dengan besaran yang bervariasi.

Bagi guru honorer SD Rp 300.000,- per bulan, guru honorer SMP Rp 350.000,- per bulan dan guru honorer SMA/SMK Rp 400.000,- per bulan.¹

Bantuan-bantuan untuk pengembangan SDM pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana disebutkan di atas diberlakukan untuk semua yang bekerja di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Sedangkan untuk guru-guru dan tenaga kependidikan yang bekerja di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag), tidak dialokasikan dananya oleh Pemerintah Kabupaten, melainkan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Perinciannya untuk biaya lauk pauk yang disediakan oleh Kementerian Agama pusat adalah Rp 20.000,- per hari, dan uang fungsional non sertifikasi Rp 250.000,- per bulan yang diberikan bagi guru PNS.

Prosedur yang diberlakukan di sini yaitu: Kemenag pusat melalui Kemenag kabupaten memberitahukan bahwa pada tahun anggaran tertentu dibuka kesempatan untuk program penyetaraan S1. Maka semua guru yang belum berpendidikan S 1 diharuskan mengikutinya. Kerjasama dilakukan dengan pihak IAIN Antasari. Pada tahun anggaran tertentu Kemenag pusat juga membuka kesempatan bagi guru-guru berpendidikan S 1 untuk melanjutkan ke S 2. Maka bagi yang berminat diminta untuk mendaftarkan dirinya untuk selanjutnya diseleksi, dan yang terpilih akan diberikan fasilitas berupa tugas belajar yang dibiayai oleh negara. Jadi untuk guru-guru dan tenaga kependidikan PNS yang berada di lingkungan Kemenag, program melanjutkan pendidikannya menjadi kewenangan pihak pusat, bukan pemerintah kabupaten/kota.

¹Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala, tanggal 10 Agustus 2011.

Dana yang disediakan oleh pemerintah pusat yang diterima bersih oleh peserta adalah Rp 1.200.000,-/ orang /bulan, setelah dipotong biaya lauk pauk oleh lembaga pendidikan yang menerimanya Rp 300.000,- / bulan. Sedangkan biaya-biaya lainnya ditanggung oleh pusat.²

Di samping itu juga dibuka kesempatan melanjutkan pendidikan melalui fasilitas izin belajar, dengan persyaratan adanya surat izin belajar dari instansi tempat bekerja. Jenis pendidikan dengan izin belajar ini dibiayai secara mandiri oleh peserta, namun ijazahnya diakui dan dapat disesuaikan nanti dengan golongan pangkatnya, asalkan jurusan yang dipilih sesuai dengan bidang pekerjaannya.

Bagi guru dan tenaga kependidikan di lingkungan Kemenag yang melanjutkan pendidikannya ke S 2 dengan fasilitas izin belajar, pihak pemerintah kabupaten/kota tetap memberikan dukungannya, yaitu membantu biaya penelitian dan penyusunan skripsi/tesis. Persyaratannya, yang bersangkutan berdomisili atau memiliki KTP Kabupaten Barito Kuala dan melakukan penelitiannya dalam daerah Kabupaten Barito Kuala. Besaran bantuan tergantung kepada kemampuan keuangan daerah.

Menurut Kepala Kemenag Kabupaten Barito Kuala, di wilayah kerjanya masalah SDM yang amat dirasakan adalah kekurangan guru madrasah yang bertatus PNS dalam arti sebagian besar masih berstatus guru honorer, terdapat banyak guru yang *mismatch*, artinya mengajar mata pelajaran yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya, dan rata-rata guru tidak memiliki pendidikan khusus yang

²Wawancara dengan Yuhyil Husna, guru SMAN Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala yang menjadi Mahasiswa S2 Manajemen Pendidikan IAIN Antasari Banjarmasin, pada tanggal 15 September 2011.

sesuai dengan bidangnya, serta masih sangat kurangnya guru madrasah yang berpendidikan S1 dan S2. Bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang telah mengembangkan pendidikannya, baik berupa pendidikan formal (S1 dan S2) serta pendidikan perjenjangan, diatur penempatan dan promosi jabatannya agar sesuai dengan pendidikan dan pelatihan terakhir yang diikutinya. Biasanya mereka diposisikan pada tugasnya semula, dan setelah terlihat kemajuannya, kemudian dipromosikan kepada jabatan yang lebih tepat. Misalnya, kalau sebelumnya sebagai guru biasa maka ditingkatkan menjadi kepala sekolah, atau sebagai guru biasa lalu diberi rangkap jabatan menjadi wakil kepala sekolah bidang tertentu, misalnya bidang kurikulum, bidang kesiswaan, bidang sarana dan prasarana dan sejenisnya.

Seiring dengan tuntutan sertifikasi guru sekarang ini maka Pemerintah Kabupaten Barito Kuala juga berupaya meningkatkan jumlah guru yang lulus sertifikasi, melalui program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Pada tahun 2010, dari keseluruhan guru yang mengikuti ujian sertifikasi, tercatat 1.212 orang yang lulus dan 1.517 orang yang tidak lulus.

Pemerintah Kabupaten Karito Kuala melalui Dinas Pendidikan memperbanyak pendidikan dan pelatihan khusus keguruan. Di antara yang dilaksanakan adalah:

Pertama, pelatihan penelitian tindakan kelas (PTK) dan penelitian tindakan sekolah (PTS). Pada tahun 2011 dilaksanakan PTK dan PTS yang diikuti oleh 102 orang peserta, terdiri dari para kepala sekolah SD dan SMP serta guru-guru mata pelajaran. Pelatihan dilaksanakan selama 5 hari. Pengajar (pelatih) didatangkan dari

Lembaga Pengendalian Mutu Pendidikan (LPMP) Departemen Pendidikan Nasional Jakarta. Syarat mengikuti pelatihan ini adalah peserta sudah berpendidikan S1. Dalam pelatihan ini diberikan pengetahuan teori dan praktik PTK dan PTS dengan menggunakan siklus-siklus, hingga pembelajaran memperoleh hasil yang tuntas. Hasil yang tuntas dimaksud, mencakup keberhasilan individual dan keberhasilan klasikal. Keberhasilan individual misalnya setiap siswa minimal memperoleh nilai 6,5 pada mata pelajaran Matematika, dan keberhasilan klasikal misalnya minimal 70 % siswa mencapai nilai 6,5 pada mata pelajaran matematika.

Target yang ingin dicapai melalui PTK dan PTS tidak semata keberhasilan belajar di segi kognitif (pengetahuan), tetapi juga berupa hasil afektif (sikap) dan psikomotor (keaktifan melakukan gerakan atau perbuatan). Dengan kata lain siswa harus aktif mendengarkan, memperhatikan, melakukan, memahami dan menguasai materi pelajaran yang didahului pula oleh keaktifan guru.

Kedua, kepada guru-guru juga diberikan pelatihan yang berkaitan dengan metode atau model pembelajaran. Instruktur didatangkan dari Banjarmasin dan dari perguruan tinggi yang memiliki keahlian di bidangnya. Salah satu yang diintensifkan saat ini adalah pembelajaran PAIKEM (pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan). Hal ini terutama ditujukan kepada guru-guru SD, yang boleh juga diikuti oleh guru-guru MI.

Pembelajaran Aktif adalah pembelajaran yang memerlukan keaktifan semua siswa dan guru secara fisik, mental, emosional, bahkan moral dan spiritual. Guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga siswa aktif bertanya,

membangun gagasan, dan melakukan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman langsung, sehingga belajar merupakan proses aktif siswa dalam membangun pengetahuannya sendiri. Siswa didorong untuk bertanggung jawab terhadap proses belajarnya sendiri. Hal ini dimaksudkan untuk menyegarkan metode pembelajaran yang selama ini lebih banyak hanya guru yang aktif sedangkan siswa pasif.

Pembelajaran Inovatif guru dilatih untuk mampu menyeimbangkan fungsi otak kiri dan kanan siswa dengan cara mengintegrasikan media/alat bantu terutama yang berbasis teknologi baru/maju ke dalam proses pembelajaran tersebut. Di antara tujuannya untuk membangun rasa percaya diri siswa. Dalam pembelajaran inovatif guru dilatih untuk bertindak inovatif dalam hal menggunakan bahan/materi baru yang bermanfaat dan bermartabat; menerapkan pelbagai pendekatan pembelajaran dengan gaya baru; memodifikasi pendekatan pembelajaran konvensional menjadi pendekatan inovatif yang sesuai dengan keadaan siswa, sekolah dan lingkungan; melibatkan perangkat teknologi pembelajaran. Siswa pun bertindak inovatif dalam arti mengikuti pembelajaran inovatif dengan aturan yang berlaku; berupaya mencari bahan/materi sendiri dari sumber-sumber yang relevan; dan belajar menggunakan perangkat teknologi maju dalam proses belajar.

Dalam pembelajaran kreatif guru bertindak kreatif dalam arti mengembangkan kegiatan pembelajaran yang beragam; membuat alat bantu belajar yang berguna meskipun sederhana, tidak harus membeli. Di sisi lain, siswa pun kreatif dalam hal merancang / membuat sesuatu; menulis/mengarang.

Pembelajaran yang efektif, guru menjadi pengajar yang menguasai materi yang diajarkan; mengajar dan mengarahkan dengan memberi contoh; menghargai siswa dan memotivasi siswa; memahami tujuan pembelajaran; mengajarkan keterampilan pemecahan masalah; menggunakan metode yang bervariasi; mengembangkan pengetahuan pribadi dengan banyak membaca; mengajarkan cara mempelajari sesuatu; melaksanakan penilaian yang tepat dan benar. Di sisi lain, siswa menjadi pembelajar yang efektif apabila mereka menguasai pengetahuan dan keterampilan atau kompetensi yang diperlukan; dan mendapat pengalaman baru yang berharga.

Pembelajaran yang menyenangkan adalah pembelajaran yang dapat dinikmati siswa. Siswa merasa nyaman, aman dan asyik. Perasaan yang mengasyikkan mengandung unsur *inner motivation*, yaitu dorongan keingintahuan yang disertai upaya mencari tahu sesuatu.

Selain itu pembelajaran perlu memberikan tantangan kepada siswa untuk berpikir, mencoba dan belajar lebih lanjut, penuh dengan percaya diri dan mandiri untuk mengembangkan potensi diri secara optimal. Lingkungan belajar dijadikan suasana belajar yang menyenangkan. Lingkungan tersebut dapat meningkatkan keaktifan siswa dan efektivitas belajar. Pembelajaran yang menyenangkan, ditandai lingkungan yang rileks, menyenangkan, tidak membuat tegang (*stress*), guru tidak membuat siswa takut salah dan dihukum; takut ditertawakan teman-teman; takut dianggap sepele oleh guru atau teman. Siswa didorong berani bertanya; berani

mencoba/berbuat; berani mengemukakan pendapat/gagasan; berani mempertanyakan gagasan orang lain.

Pendidikan dan pelatihan pembelajaran PAIKEM diberikan khusus kepada guru, dalam bentuk pengetahuan dan juga praktik. Guru-guru dilatih agar dapat mengembangkan model-model pembelajaran yang bersifat PAIKEM, seperti model kooperatif tipe jigsaw, kontekstual, STAD, inquiri, bermain peran dan sebagainya. Dengan adanya diklat ini, maka guru dapat mengembangkan metode pembelajaran, dan tidak lagi terbatas dengan metode konvensional seperti ceramah, tanya jawab, penugasan, peragaan, ulangan, menghafal dan sejenisnya, yang kurang mendorong siswa kepada keaktifan belajar, bahkan sering membuat siswa takut dan pasif serta potensinya kurang berkembang karena hanya guru yang aktif.

Sejauh ini rata-rata guru SD/MI di Kabupaten Barito Kuala sudah pernah mengikuti diklat pembelajaran PAIKEM. Bahkan di antara mereka ada yang pernah mengikutinya sampai 2 kali, baik di kabupaten maupun di provinsi. Pendalaman tentang PAIKEM juga dilakukan dalam ruang lingkup yang lebih kecil, seperti kelompok kerja kepala sekolah (KKKS), kelompok kerja guru (KKG) dan kelompok kerja guru mata pelajaran (KKGMP). Di sini mereka mengundang instruktur dari luar, atau bahkan meminta teman sejawat yang sudah ahli untuk memberikan pelatihan PAIKEM.

Kepada guru-guru senior (golongan IV) yang ingin mengusulkan kenaikan pangkat dipersyaratkan membuat karya tulis ilmiah atau penelitian lapangan. Sejak 3 tahun terakhir, penelitian lapangan yang dianjurkan adalah dalam bentuk PTK.

Mereka dilatih melakukan PTK pada mata pelajaran yang diajarkan di sekolah, dengan memilih salah satu model PAIKEM. PTK dilakukan dengan didampingi guru pengamat (observer) misalnya kepala sekolah atau guru lain yang lebih senior. Hasil PTK dilaporkan dalam bentuk siklus-siklus sampai pembelajaran mencapai nilai tuntas. Hasil diklat PTK/PTS yang diberikan oleh LPMP banyak manfaatnya dalam membantu guru melakukan penelitian dan menyusun karya tulis.

Diakui oleh kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala bahwa pengetahuan dan keterampilan guru dalam hal karya tulis ilmiah dan penelitian khususnya PTK masih kurang. Hal ini karena sebagian mereka baru saja menyelesaikan pendidikan sarjananya dan belum banyak memiliki pengalaman sebelumnya. Oleh karena itu pihaknya terus mendorong guru agar aktif belajar dan mengikuti pendidikan dan pelatihan terkait, baik secara mandiri maupun yang dilaksanakan oleh sekolah atau dinas.

Terkait dengan hal ini guru-guru dan tenaga kependidikan juga dilatih agar bisa menggunakan teknologi, khususnya komputer dan laptop agar mereka bisa mengolah data, belajar melalui internet dan kalau bisa juga mengajar siswa dengan menggunakan media tersebut. Kebanyakan guru sudah memiliki alat tersebut, namun penggunaannya masih terbatas untuk mengetik saja, belum banyak digunakan untuk belajar dan mengajar.

Di samping kebijakan untuk meningkatkan SDM pendidikan, juga dilakukan kebijakan umum untuk memajukan pendidikan. Untuk tahun 2010/2011 kebijakan di bidang pendidikan adalah mewujudkan penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat

yang ditunjukkan oleh semakin terjangkaunya dan meratanya akses untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi:

Kebijakan pertama, meningkatkan jumlah anggaran dan fokus belanja bidang urusan pendidikan. Tersedianya daftar skala prioritas pembangunan bidang pendidikan yang sistematis dan teralokasinya belanja langsung urusan pendidikan minimal 20 % dari belanja langsung anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setiap tahun. Nama program adalah manajemen pelayanan pendidikan, dengan pelaksana lapangan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.

Kebijakan kedua, menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan memulai menetapkan pendidikan dasar 12 tahun dengan meningkatnya jumlah anak usia wajib belajar yang tertampung di sekolah dasar dan SMP. Meningkatnya jumlah anak usia wajib belajar sembilan tahun yang lulus SMP. Nama program adalah wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pendidikan menengah. Meningkatnya jumlah masyarakat yang tertampung dalam kelompok belajar, saat ini ada 12 kelompok. Nama program adalah wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Meningkatnya jumlah masyarakat yang lulus kelompok belajar paket (pendidikan nonformal). Saat ini Paket A sebanyak 20 orang, Paket B 142 orang dan Paket C 124 orang.

Meningkatnya jumlah desa dan intensitas pelayanan perdesa dengan layanan perpustakaan keliling 90 kali 15 kecamatan. Pada tahun 2010 terlaksana 60 kali 15 kecamatan. Nama program adalah supervisi pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat. Bertambahnya judul buku dan jumlah pustaka menjadi 1,578 buku. Pada

tahun 2010 tercapai 1500 buah buku. Nama program adalah pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan. Pelaksana lapangan adalah perpustakaan dan kantor perpustakaan daerah. Meningkatkan jumlah masyarakat usia wajib belajar 9 tahun dan 16-17 tahun. Nama program adalah program pendidikan menengah. Pelaksana lapangan adalah Dinas Pendidikan.

Kebijakan ketiga, menuntaskan masalah buta aksara di kalangan masyarakat usia produktif. Jumlah masyarakat usia produktif yang buta aksara, pada tahun 2010 berjumlah 180 orang. Nama program adalah pendidikan nonformal. Meningkatkan jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam pemberantasan buta aksara dan 8 PKDM, nama program adalah pendidikan nonformal.

Kebijakan keempat, meningkatkan intensitas kegiatan pendidikan anak usia dini (PAUD), tahun 2010 tercapai 593 guru. Meningkatnya jumlah kelompok masyarakat penyelenggara PAUD yang pada tahun 2010 telah dimiliki 114 lembaga/kelompok. Meningkatnya jumlah peralatan PAUD, meningkatnya jumlah anak usia dini yang mengikuti PAUD. Nama program adalah pendidikan anak usia dini. Masyarakat penyelenggara PAUD dan punya kepedulian untuk terlibat dalam PAUD juga meningkat, mencapai 114 buah lembaga, begitu juga peralatan PAUD mengalami peningkatan, disertai peningkatan jumlah anak usia dini yang mengikuti PAUD.

Kebijakan kelima, meningkatkan kualitas dan kualitas sekolah, ruang kelas, sarana dan prasarana pembelajaran, belajar mengajar dan mendidik. Meningkatnya jumlah ruang kelas dan sekolah yang berkualitas memadai untuk kegiatan

pembelajaran. Nama program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, pendidikan menengah, peningkatan akses dan mutu pendidikan. Meningkatkan jumlah dan jenis alat peraga ajar, buku-buku wajib serta buku penunjang untuk pegangan belajar mengajar.

Kebijakan keenam, meningkatkan sistem dan manajemen penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan tingkat kualitas, memenuhi kebutuhan lokal, dan standar pendidikan nasional. Nama program peningkatan tata laksana akuntabilitas dan pencitraan publik. Terakomodasinya materi kurikulum sekolah bermuatan potensi daerah Kabupaten Barito Kuala, mencakup agrobisnis, agroindustri, komputer dan bahasa Inggris pada SMA dan SMK. Nama program pengembangan kurikulum muatan lokal.

Meningkatkan jumlah sekolah yang memenuhi standar kualitas pendidikan. Nama program pengembangan pendidikan. Menjamin terpenuhinya standar rasio guru dan murid di setiap sekolah. Nama program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

Kebijakan ketujuh, memberikan beasiswa dan bantuan belajar kepada siswa dan mahasiswa yang dipilih secara objektif, baik karena prestasi maupun karena kurang mampu. Tujuannya untuk meningkatkan jumlah siswa dan mahasiswa berprestasi atau kurang mampu yang layak diberi beasiswa. Pada tahun 2010 terdapat 12 orang siswa yang diberikan beasiswa, masing-masing 3 orang dari SD, 3 orang dari SMP, 3 orang dari SMA dan 3 orang SMK. Nama program adalah wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Dinas Pendidikan juga melakukan upaya

meningkatkan siswa berprestasi di bidang olahraga dan berbagai bidang lainnya. Pada tahun 2010 tercatat siswa berprestasi pada 6 jenis OR, 3 jenis OS dan 2 jenis Kes. Nama program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

Kebijakan kedelapan adalah mengurangi beban masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, yaitu mengurangi dan menghilangkan pungutan-pungutan sekolah yang sekiranya dapat membebani masyarakat. Nama program adalah program akses pendidikan.

Beberapa kebijakan bidang pengembangan SDM pendidikan sebagaimana dikemukakan di atas diiringi dengan penyediaan dana yang memadai, pemberian dukungan penyetaraan pendidikan, serta menjalin kerjasama dengan Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Terbuka, dan perguruan tinggi lainnya.

Anggaran APBD tiga tahun terakhir bervariasi, pada tahun 2009 total 530.982.762.020, dan tahun 2010 total Rp. 595.921.826.065. Pada tahun 2011 total pendapatan Rp. 571.739.385.905,100- sebelum perubahan APBD tahun 2011. sedangkan belanja Rp 589.534.371.847,00. Kondisi ini karena adanya beberapa kebijakan yang mempengaruhi, antara lain, mekanisme penyerahan dari pemerintah pusat ke daerah, termasuk pengelolaannya, seperti dana BOS, penyerahan dari pemerintah pusat ke daerah, termasuk pengelolaannya, seperti dana BOS, dana BOK, dana sertifikasi, dan BLUD, dan dana urusan bersama. Selain itu, adanya dana *sharing* untuk DAK, PNPM-Perdesaaan dan Perkotaan. Program Pamsimas, percepatan penanggulangan kemiskinan, program PKH program penanggulangan banjir dan seterusnya.

Dana untuk urusan wajib bidang pendidikan cakupannya luas, tidak hanya dikelola Dinas Pendidikan, tetapi banyak SKPD juga mengalokasikan dana pendidikan seperti, Dinas Kesehatan dalam program beasiswa dokter spesialis, akademi kebidanan, S2 Bidang kesehatan lainnya, pada BKD berupa beasiswa, tugas belajar, dan sejenisnya, juga pada sekretariat, serta adanya program insentif guru honor komite, guru honor diniyah, insentif tutor PAUD dst.

APBD yang diperuntukkan urusan wajib bidang pendidikan melampaui 20% yang telah ditentukan. Contoh untuk dinas pendidikan tahun 2009 mendapat anggaran sebesar Rp. 147.019.007.155, dari APBD sebesar Rp. 530.982.762.020, tahun 2010 sebesar Rp. 215.959.355.892, dari APBD sebesar Rp. 595.921.826.065, sedangkan tahun 2011 sebesar Rp. 206..595.364.480,00,- dari APBD. Anggaran sektor pendidikan ini pada beberapa SKPD berjumlah Rp 206.031.941.976,00,-.

Dana pengembangan dari pemerintah pusat, melalui dana dekonsentrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi sebagai perpanjangan dari pemerintah pusat. Aspek yang didanai oleh APBD untuk pendidikan mengacu pada PP. No. 19 tahun 2005, tentang standar nasional pendidikan, yakni dari pengembangan kurikulum hingga sistem penilaian, akan tetapi yang paling besar pada prasarana dan sarana, selanjutnya peningkatan SDM tenaga kependidikan.

Dinas Pendidikan setiap tahun mengajukan renja (rencana kerja) yang disusun melalui dua arah yakni melalui musyawarah rencana pengembangan (Musrenbang) kecamatan dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dengan rencana strategis (Renstra) yang disusun oleh Dinas Pendidikan sendiri.

Untuk penyaluran dana sektor pendidikan itu selalu mengacu pada mekanisme sumber pendanaannya, contoh untuk DAK tentu mengacu pada aturan/mekanisme DAK, sedangkan untuk dana lainnya, sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia pada APBD sebagaimana yang tertuang dalam kebijakan umum anggaran. Yang lain seperti dana BOS, dana sertifikasi tentunya selain mengacu pada petunjuk, tetapi juga berdasar jumlah siswa atau guru sebagai alat untuk mengukur besaran dana yang disalurkan.

Masalah yang mendasar adalah kondisi geografis daerah, hal ini berdampak pada penempatan tenaga kependidikan, kualitas bangunan, dan sarana transportasi dari ibukota kecamatan, kabupaten ke lokasi sekolah. Sehingga dana untuk itu semua menjadi besar, seperti material untuk bangunan, transportasi kunjungan, monitoring dan evaluasi, dll.

Upaya untuk mengatasi berbagai masalah adalah adanya program SMP satu atap, pemberian insentif tenaga honor komite, dukungan untuk Unit Pelaksana Teknis berupa gedung dan fasilitas lainnya, optimalisasi fungsi-fungsi pendidikan non formal, penataan organisasi dinas pendidikan, penambahan tenaga pengawas, pemilik, peningkatan kualitas prasarana dan sarana pendidikan, rehab berat, ringan, ruang perpustakaan, pengadaan buku bacaan dan buku pembelajaran, dan lain-lain.

Anggaran belanja yang dialokasikan untuk bidang pendidikan dan aktivitas pendidikan pada tahun 2011, diproyeksikan telah terpenuhi minimal 20 persen, dari belanja daerah. Sesuai dengan surat menteri dalam negeri nomor 903/2706/SJ tanggal

8 September 2008 perihal pendanaan pendidikan APBD tahun anggaran 2010, alokasi untuk belanja fungsi pendidikan seperti dimaksud di atas meliputi komponen:

- 1) Belanja langsung yang merupakan belanja untuk kegiatan fungsi pendidikan (belanja honorarium/upah, belanja barang dan jasa, dan belanja modal) peningkatan sarana dan prasarana serta biaya operasional SMK Negeri 3 dan pembangunan SMK Negeri 4 pada dinas pendidikan, tidak termasuk belanja untuk pendidikan kedinasan.
- 2) Belanja tidak langsung terdiri dari:
 - a. Gaji tenaga pendidikan (guru, pamong belajar, fasilitator, penilik, pengawas sekolah dan pengawas mata pelajaran dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya);
 - b. Gaji PNS dinas pendidikan;
 - c. Bantuan keuangan untuk fungsi pendidikan;
 - d. Hibah untuk fungsi pendidikan;
 - e. Bantuan sosial (beasiswa pendidikan untuk masyarakat).

Total belanja daerah merupakan total belanja seluruh SKPD termasuk alokasi anggaran untuk kegiatan lanjutan yang belum selesai tahun sebelumnya. Dengan meningkatnya alokasi anggaran pendidikan ini, diharapkan penyelenggaraan pendidikan berkualitas menjadi lebih merata dan terjangkau. Demikian pula dengan meningkatnya anggaran pendidikan, pungutan-pungutan di sekolah yang dilakukan oleh komite sekolah dapat dikendalikan sehingga masyarakat benar-benar kurang terbebani dalam mengupayakan pendidikan bagi anak-anaknya. Namun tetap harus

diingat bahwa pendidikan dan biaya untuk pendidikan tetap menjadi tanggung jawab bersama antara orangtua, masyarakat dengan pemerintah.

Melalui kebijakan anggaran belanja inilah anggaran bidang pendidikan diatur dan ditetapkan, antara lain alokasi anggaran pendidikan tersebut dipergunakan untuk pemberian beasiswa, peningkatan pelayanan kepada pendidik pengajar, peningkatan penyediaan sarana dan prasarana belajar, penghargaan yang memadai bagi putra-putri kabupaten barito kuala yang berprestasi. Melalui anggaran pendidikan ini diharapkan jumlah masyarakat yang selesai wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun bertambah sehingga sisa sampai akhir tahun 2011 menjadi 5-8 persen. Angka ini diharapkan akan memberikan kontribusi naiknya indeks pembangunan manusia (IPM) secara nyata dan memadai.

Bersamaan dengan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang diberikan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah juga membantu bantuan operasional pendidikan daerah (BOPD), yang penggunaannya tidak seketat penggunaan dana BOS, melainkan diserahkan kepada kebijakan sekolah.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan sumber daya manusia pendidikan dalam kebijakan pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala

Kebijakan-kebijakan pemerintah Kabupaten Barito Kuala terkait dengan sumber daya pendidikan dipengaruhi oleh:

a. Faktor politik

Faktor politik yang dimaksudkan di sini adalah perjuangan dan usaha DPRD untuk meningkatkan alokasi dana pendidikan khususnya untuk peningkatan kualitas

sumber daya manusia pendidikan. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ketua DPRD Barito Kuala Bapak H. Husain Ahmad, serta dengan Ketua DPD Golkar Bapak Drs. H. Hikmatullah, diperoleh informasi bahwa sebagai lembaga perwakilan rakyat yang salah satu tugasnya adalah menyalurkan aspirasi rakyat, termasuk di bidang pendidikan, mereka berusaha untuk memperjuangkan agar sektor pendidikan terus ditingkatkan di Kabupaten Barito Kuala.³

Sektor pendidikan yang diperjuangkan oleh DPRD dimaksud, tidak sebatas untuk meningkatkan kualitas SDM guru-guru dan tenaga kependidikan, melainkan untuk keseluruhan aspek pendidikan pada umumnya, yang menjadi kebutuhan masyarakat dan sering dipermasalahkan oleh para pelaksana pendidikan di daerah. Hal ini karena pihak DPRD mengacu kepada UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang meliputi:

1. Standar isi
2. Standar proses;
3. Standar kompetensi lulusan;;
4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan;
5. Standar sarana & prasarana;
6. Standar pengelolaan;
7. Standar pembiayaan; dan

³Wawancara dengan Ketua DPRD Barito Kuala Bapak H. Husain Ahmad, serta Ketua DPD Golkar yang juga anggota DPRD Barito Kuala Bapak Drs. H. Hikmatullah, tanggal 1 Agustus 2011.

8. Standar penilaian pendidikan.

Untuk memenuhi standar tersebut maka pihak DPRD beranggapan bahwa dukungan pemerintah daerah sangat diperlukan, baik dalam bentuk kebijakan maupun pendanaan. Usaha yang mereka lakukan adalah dengan mendesak agar pihak eksekutif, dalam hal ini Bupati Barito Kuala dapat mengalokasikan dana yang cukup untuk meningkatkan pendidikan. Kemudian pelaksana teknis pendidikan, dalam hal ini Dinas Pendidikan beserta jajarannya dituntut untuk melaksanakan program pendidikan sebagaimana mestinya.

DPRD Kabupaten Barito Kuala melalui Komisi 3 yang membidangi pendidikan juga proaktif melakukan pengawasan kepada pemerintah dan Dinas Pendidikan agar melaksanakan program pendidikan sebagaimana mestinya, baik di segi pendanaan maupun pelaksanaan hingga evaluasi.

Dari usaha yang dilakukan, maka diperoleh beberapa hasil terkait pendidikan sebagai berikut:

1) Adanya kebijakan bupati menunjang pendidikan

Bupati telah merespon aspirasi politik DPRD dan masyarakat yang menghendaki agar kualitas pendidikan termasuk di bidang SDM pendidikan terus ditingkatkan. Selama ini ada kesan bahwa kualitas pendidikan dan SDM pendidikan di kabupaten ini relatif tertinggal dibandingkan dengan daerah lainnya.

Maka lahirlah keputusan bupati terkait hal tersebut. Kebijakan dimaksud adalah Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 36 Tahun 2011 tentang Peningkatan Kualifikasi Tenaga Kependidikan, diberikan kesempatan kepada semua tenaga

kependidikan di daerah ini, baik guru, pegawai Dinas Pendidikan, petugas laboratorium, petugas perpustakaan, tata usaha, tutor (pelatih), penjaga sekolah, dan sebagainya, untuk meningkatkan pendidikannya ke jenjang S1, S2 bahkan S3. Dengan adanya kebijakan ini maka semua guru yang tingkat pendidikannya relatif masih rendah dan belum sesuai dengan standar pendidikan nasional, khususnya standar pendidik dan tenaga kependidikan, diberikan kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang S 1, S 2 bahkan S 3.

2) Adanya alokasi dana pendidikan yang semakin besar

Sebagaimana disebutkan terdahulu, dana pemerintah Kabupaten Barito Kuala telah menyediakan dana yang cukup besar untuk pengembangan sektor pendidikan. Menurut pihak DPRD Barito Kuala, dana pendidikan dimaksud sudah yang terbesar dibanding sektor-sektor lainnya. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3: Anggaran Pendidikan 2010

No	Jenis bantuan	Besar bantuan
1.	Bantuan tidak langsung	Rp 168.916.572.166,-
2.	Bantuan langsung non DAK	Rp 20.039.229.648,-
3.	Bantuan langsung DAK	Rp 25.186.150.000,-
4.	Jumlah	Rp 214.141.951.834,-

Jumlah anggaran pendidikan di Kabupaten Barito Kuala merupakan yang terbesar dibanding dengan anggaran bidang-bidang lainnya, seperti kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Sebagai bandingan dikemukakan dalam tabel berikut:

Tabel 4: Perbandingan Anggaran Pendidikan dengan Sektor Lain

Bidang	Bantuan tidak langsung	Bantuan langsung non DAK	Bantuan langsung DAK	Jumlah belanja
1. Dinas Kesehatan	22.242.264.067	10.562.070.600	2.307.250.000	35.111.584.667,
2. RSUD H Abdul Aziz	7.474.002.813	5.255.884.720	-	13.669.887.533
Dinas Pekerjaan Umum (PU)	3.867.057.331	85.258.700.292.	17.853.350.000	106.979.307.623

2) Faktor ekonomi

Faktor ekonomi terkait dengan pengembangan SDM pendidikan di Kabupaten Barito Kuala meliputi;

a) Ekonomi daerah

Sumber APBD untuk pendidikan yang dimiliki oleh Kabupaten Barito Kuala selama ini berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), pajak daerah, retribusi daerah, penghasilan daerah, DAU, DAK, Urusan Bersama, Dekonsentrasi, Sertifikasi, dll. Perinciannya dikemukakan dalam tabel berikut;

Tabel 5: Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun 2010

No.	Penerimaan dan pendapatan	Jumlah
1.	Pendapatan asli daerah (PAD)	Rp 17.244.760.886,-
1.1.	Pajak daerah	Rp 3.559.334.400,-
1.2.	Retribusi daerah	Rp 2.353.263.220,-
1.3.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp 800.000.000,-
1.4.	Lain-lain PAD yang sah	Rp 10.532.164.266,-

2.	Dana Perimbangan	Rp 482.352.180.000,-
2.1.	Dana bagi hasil pajak dan bukan pajak	Rp 72.000.000.000,-
2.3.	Dana alokasi umum (DAU)	Rp 351.563.380.000,-
2.4.	Dana alokasi khusus (DAK)	Rp 58.788.800.000,-
3.	Pendapatan lain yang sah	Rp 72.142.445.019,-
3.1.	Hibah	Rp 28.324.995,-
3.2.	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	Rp 13.200.000.000,-
3.3.	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	Rp 27.714.120.024,-
3.4.	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	Rp 1.200.000.000,-
3.5.	Dana penguatan dan percepatan	Rp 30.000.000.000,-
	Jumlah pendapatan daerah	Rp 571.739.365.905,-
4.	Penerimaan pembiayaan	Rp 32.250.000.000,-
	Jumlah	Rp 603.989.365.905,-

Sumber data: Prioritas dan Plafon Anggaran Kabupaten Barito Kuala 2010.

Sumber dana untuk pendidikan berasal dari bantuan tidak langsung serta bantuan langsung DAK dan non DAK. Semua itu banyak tergantung kepada sumber-sumber pendapatan asli daerah dan penerimaan lainnya. Karena itu makin besar penerimaan, maka makin besar pula alokasi dana untuk sektor pendidikan.

Selama ini potensi atau sumber-sumber daya ekonomi yang berkembang di Kabupaten Barito Kuala banyak berasal dari sektor pertanian, industri pengolahan, listrik dan air bersih, bangunan, perdagangan, restoran dan hotel, transportasi dan komunikasi, keuangan, perusahaan dan jasa perusahaan serta jasa-jasa lainnya. Sementara sumber ekonomi dari sektor pertambangan dan kehutanan yang banyak dimiliki daerah-daerah lain di Kalimantan Selatan, justru tidak dimiliki oleh

Kabupaten Barito Kuala. Hal ini juga mempengaruhi kepada pendapatan daerah. Banyak perusahaan industri pengolahan kayu yang tidak lagi beroperasi disebabkan ketiadaan bahan baku, berakibat pemasukan perusahaan besar di sektor ini tidak potensial lagi. Sekiranya daerah memiliki sumber pemasukan dari pertambangan dan kehutanan, dipastikan alokasi dana untuk pendidikan semakin dapat ditingkatkan.

b) Ekonomi pendidik dan tenaga kependidikan

Pendidik dan tenaga kependidikan yang dikembangkan kualitas SDMnya terbagi dua, yaitu pendidikan formal dengan mengikuti kuliah tertentu dan pendidikan nonformal berupa diklat tertentu. Pendidikan formal terbagi dua, yaitu tugas belajar dan izin belajar. Untuk tugas belajar biayanya dibebankan kepada pemerintah daerah, sedangkan untuk izin belajar biayanya menjadi tanggung jawab peserta bersangkutan. Begitu juga untuk guru-guru yang sudah lulus uji sertifikasi, biaya pendidikannya dibebankan kepada yang bersangkutan, karenanya gajinya dianggap sudah mencukupi.

Berkenaan dengan hal ini di antara guru-guru ada yang kurang berminat mengembangkan pendidikannya ke jenjang S 2, dengan alasan ekonomi. Artinya mereka merasa bahwa tanggung jawab ekonomi keluarga masih banyak yang harus diperhatikan, seperti membiayai anak yang sekolah/kuliah dan kebutuhan rumah tangga yang semakin besar. Justru itu walaupun ada kesempatan mendapatkan program tugas belajar yang sepenuhnya dibiayai pemerintah, tidak semua guru bersedia mengikutinya. Apalagi yang sekadar mendapatkan izin belajar, yang

biayanya ditanggung guru bersangkutan, maka hanya guru-guru tertentu yang memiliki idealisme yang mau mengikutinya.

c. Faktor geografis

Kabupaten Barito Kuala memiliki wilayah-wilayah kecamatan yang cukup luas yang tidak semua akses jalan ke ibukota kabupaten dan provinsi berjalan lancar. Banyak yang masih menggunakan transportasi sungai dan jalan daratnya tidak semuanya bagus. Hal ini menyulitkan bagi guru-guru yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang S2 secara mandiri melalui fasilitas izin belajar. Bahkan ketika Dinas Pendidikan berupaya menuntaskan agar semua guru berpendidikan S1, banyak guru yang mengalami kesulitan karena bertugas di tempat yang cukup jauh atau tempat domisilinya jauh dari tempat pendidikan berlangsung.

Karena faktor geografis ini maka selama ini guru-guru yang banyak mengikuti pendidikan S 1 dan S 2 umumnya berasal dari kecamatan Marabahan, dan memang guru-guru yang berada/bertugas di ibukota kabupaten lebih dahulu dianjurkan untuk meningkatkan pendidikannya, tanpa mengenyampingkan guru-guru dari kecamatan yang relatif jauh.

d. Faktor kemauan

Faktor lain yang mempengaruhi pengembangan SDM guru adalah kemauan, maksudnya tidak semua guru berminat, bersedia dan bersemangat untuk meningkatkan pendidikannya ke jenjang S1 dan S2. Khususnya pendidikan S1 yang sekarang masih belum tuntas 100 %, sebagian guru mengikutinya karena terpaksa, dalam arti hanya karena pemerintah mewajibkannya. Sekiranya pemerintah tidak

mewajibkan, maka mereka tidak bersedia dan mencukupkan pendidikan seadanya saja. Guru-guru yang bersikap demikian terutama yang bertugas di daerah yang jauh dari perkotaan, yang kurang merasakan tantangan dunia pendidikan, sehingga pengetahuannya yang ada sekarang dirasa sudah cukup. Juga guru-guru yang sudah berusia relatif tua, yang merasa karier dan golongan pangkatnya sudah tidak berkembang lagi.

e. Faktor kemampuan

Faktor kemampuan yang dimaksudkan di sini bukan kemampuan ekonomi, melainkan kemampuan fisik, psikis dan intelektual. Sebagian guru merasa terhambat mengembangkan pendidikannya ke jenjang S1 dan S2 karena faktor usia, sehingga fisik sudah mulai melemah, cepat lelah dan sakit-sakitan, sehingga untuk aktif kuliah dan bepergian jauh sudah kurang memungkinkan.

Mereka juga merasa pikiran mudah tegang, daya ingatan menurun, kemampuan membaca menurun karena kesehatan mata menurun, dan sulit memahami pelajaran. Selain itu mereka juga kurang mampu mengerjakan tugas-tugas sebagaimana mestinya. Tidak jarang tugas-tugas kuliah itu dibantu mengerjakan atau mengetiknya oleh anak, keluarga atau diupahkan kepada orang lain. Hal ini membuat para guru itu menyadari bahwa mereka hanya beroleh gelar kesarjanaan, namun pengalaman kuliah yang sebenarnya serta pengetahuan dan keahlian yang diperoleh tidak optimal. Guru-guru juga mengakui tidak cukup menguasai teknologi komputer, internet dan sejenisnya

Di antara guru-guru yang sudah senior yang harus mengikuti perkuliaha itu juga merasa mereka sudah sulit menyesuaikan diri dengan alam perkuliahan pada umumnya. Mereka kadang-kadang agak tersinggung dengan sikap sebagian dosen-dosen muda yang kurang menghargai orang tua, kurang menghormati senioritas dan terlalu keras dalam melakukan bimbingan skripsi atau dalam penugasan-penugasan. Namun karena harus menurut, maka mereka menjalani dengan setengah hati. Tidak jarang ada guru yang memilih berhenti, karena merasa sulit menyesuaikan diri. Para guru senior itu merasa di segi pengalaman mereka lebih lama, hanya saja gelar kesarjanaan yang kurang dimiliki. Mereka mengharapkan para dosen dapat mempertimbangkan hal-hal yang bersifat emosional tersebut, usia, keterbatasan fisik, sehingga tidak terlalu menuntut berlebihan.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengembangan sumber daya pendidikan dalam kebijakan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala

Berdasarkan data yang telah disajikan, kelihatan bahwa pemerintah kabupaten Barito Kuala telah memberikan perhatian dan dukungan yang cukup tinggi terhadap sektor pendidikan. Hal ini tampak dari disediakannya dana yang cukup besar untuk mengembangkan pendidikan di daerah. Tampak bahwa alokasi dana untuk pengembangan pendidikan menempati urutan pertama dari belanja daerah, melebihi anggaran sektor lain seperti infrastruktur (pembangunan fisik), sektor kesehatan dan lain-lain. Kalau biasanya pembangunan infrastruktur menempati ranking pertama

dalam belanja daerah, maka pada tahun-tahun terakhir justru sektor pendidikan yang mendapatkan dana terbesar.

Besarnya alokasi dana untuk pendidikan memang merupakan sebuah tuntutan dan keharusan. Pendidikan merupakan sarana untuk membangun kualitas sumber daya manusia (SDM). Hal ini karena kemajuan suatu bangsa atau negara tidak selalu disebabkan atau diukur oleh kekayaan sumber daya alamnya (SDA), melainkan disebabkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang sudah begitu tinggi.

Sebagaimana bangsa-bangsa lain pada umumnya, bangsa Indonesia berada di tengah pergaulan internasional yang semakin kompetitif. Agar bangsa ini dapat bersaing secara sehat, maka harus ada upaya yang sungguh-sungguh untuk membekali diri dengan berbagai persiapan. Satu di antara persiapan tersebut adalah perlunya mewujudkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang dapat diandalkan. Di antara persoalan besar yang menjadi tantangan bangsa Indonesia adalah lemahnya SDM, sehingga pembangunan sumber daya manusia (SDM) harus diprioritaskan untuk ditangani.

Mempersiapkan SDM yang berkualitas tidak dapat dilakukan seperti membalik telapak tangan, tetapi diperlukan usaha, keseriusan dan waktu yang relatif lama. Pembangunan di sektor pendidikan diarahkan untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa, agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan perlindungan sesuai dengan potensinya.

Upaya meningkatkan kualitas SDM generasi muda, khususnya anak didik memerlukan upaya awal berupa peningkatan SDM guru dan tenaga kependidikan. Mereka ini mestilah memiliki kemampuan profesional, agar sebagai penyelenggara pendidikan di lembaga-lembaga persekolahan mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik, profesional dan mencapai hasil yang optimal.

Arah pembangunan pendidikan adalah juga dalam bentuk meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa dan lembaga pendidikan. Dengan kata lain, sebelum para pendidik itu meningkatkan kualitas anak didik, mereka sendiri harus berkualitas baik. Asumsinya, jika para pendidik berkualitas baik, maka anak didik juga berkualitas baik, begitu juga sebaliknya.

Terkait dengan hal ini Pemerintah Kabupaten Barito Kuala telah melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas SDM guru dan tenaga kependidikan, melalui berbagai program, dengan target agar semakin banyak guru yang berpendidikan S 1 dan S2, semakin banyak guru mengikuti berbagai diklat keguruan, diklat perjenjangan dan lulus sertifikasi guru. Upaya ke arah ini tentu patut disambut gembira, khususnya oleh para guru dan tenaga kependidikan sendiri.

Tetapi kenyataan yang terlihat, jumlah guru yang sudah menjalani pendidikan S 1 dan S 2 masih terlalu sedikit dibandingkan dengan jumlah guru keseluruhan. Tahun 2010 jumlah guru yang sudah menyelesaikan pendidikan S 1 sebanyak 272

orang, yang sedang menjalani pendidikan S 1 sebanyak 186 orang, yang menyelesaikan pendidikan S 2 sebanyak 10 orang dan S 3 sebanyak 1 orang. Sedangkan untuk pendidikan perjenjangan, pada tahun 2010 dan 2011 masing-masing sudah mengikuti 2 orang dan 3 orang. Kalau dibandingkan dengan jumlah guru pada beberapa tingkatan pendidikan (SD, SMP, SMA/SMK) sebagaimana dikemukakan pada tabel 2, jelas jumlah guru yang sudah menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 di atas terlalu sedikit.

Begitu juga jumlah guru yang sudah lulus sertifikasi masih relatif kecil. Pada tahun 2010, dari keseluruhan guru yang mengikuti ujian sertifikasi, tercatat 1.212 orang yang lulus dan 1.517 orang yang tidak lulus.

Apabila tingkat pendidikan dan kelulusan dalam sertifikasi dijadikan alat ukur kualitas SDM guru-guru, maka dengan melihat angka-angka di atas, dapat dikatakan bahwa kualitas SDM guru-guru dan tenaga kependidikan di Kabupaten Barito kuala masih kurang dan karenanya perlu terus ditingkatkan.

Upaya peningkatan ini merupakan suatu tuntutan, karena selain berupaya meingkatkan kualitas sumber daya manusia pendidikan, pemerintah Kabupoaten Barito Kuala juga meningkatkan program-program pendidikan pada umumnya, seperti pembangunan sarana dan prasaran sekolah, perlengkapan peralatan teknologi pembelajaran dan peningkatan pembiayaan operasional sekolah, khususnya melalui BOS, BOPD, DAK, DAU dan sebagainya. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan tersebut harus dibarengi dengan peningkatan kualitas SDM guru dan

tenaga kependidikan. Jika tidak maka akan banyak sarana dan prasarana yang tidak fungsional dan akan banyak kebijakan pendidikan yang kurang berjalan optimal.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan sumber daya manusia pendidikan dalam kebijakan pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala

Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah dalam mengembangkan kualitas SDM pendidikan. Bagi pemerintah Kabupaten Barito Kuala, faktor-faktor tersebut meliputi faktor politik, ekonomi, serta kemauan dan kemampuan para guru dan tenaga kependidikan itu sendiri. Di segi faktor politik kelihatannya sudah mendukung, sebab DPRD sebagai lembaga politik telah memperjuangkan peningkatan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan, sehingga dana pendidikan sudah melebihi angka 20 % dari APBD. Di samping itu pemerintah kabupaten telah pula mengeluarkan peraturan yang mendorong dan memfasilitasi para guru dan tenaga kependidikan agar meningkatkan pendidikannya ke jenjang S1 dan S2.

Dukungan politik pemerintah daerah ini merupakan hal yang positif, dan semestinya dapat dijalankan secara seimbang, dalam arti tidak saja guru-guru dan tenaga kependidikan dari Dinas Pendidikan saja yang dibantu, melainkan juga guru-guru dan tenaga kependidikan di lingkungan Kementerian Agama. Hal ini karena pasal 12 ayat (1) PP Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan telah menetapkan bahwa bantuan sumber dana dan daya pendidikan agama dan keagamaan juga merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Jadi sebaiknya bantuan pemerintah daerah tidak saja untuk biaya penelitian dan

penyusunan skripsi/tesis bagi yang memohonnya, melainkan juga biaya studi, baik bagi peserta yang memohon maupun tidak memohon. Hal ini karena ada hak yang melekat pada peserta pendidikan.

Dari segi faktor ekonomi, kelihatannya agak kurang mendukung jika dilihat dari sumber-sumber penghasilan daerah (PAD) yang relatif kecil. Hal ini karena Barito Kuala tidak memiliki sumber-sumber ekonomi potensial seperti industri dan pertambangan sebagaimana daerah-daerah lain di Kalsel. Kabupaten Barito Kuala lebih mengandalkan sektor pertanian, yang memang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani, tetapi kurang berkontribusi terhadap pemasukan PAD.

Meskipun demikian hal ini tidak secara otomatis mengurangi alokasi dana untuk pendidikan. Kenyataannya dana pendidikan tetap besar. Hal ini karena dana untuk pendidikan berasal dari berbagai sumber yang sudah pasti, yaitu bantuan tidak langsung, bantuan langsung DAK, dan bantuan langsung non DAK, dengan jumlah total untuk tahun 2010 mencapai Rp 214.141.951.834,-. Besarnya angka ini menunjukkan bahwa pengembangan kualitas SDM pendidikan di daerah, termasuk Barito Kuala tidak semuanya bergantung kepada PAD. Dengan begitu maka program peningkatan kualitas SDM guru dan tenaga kependidikan dapat terus dilakukan, tanpa mengkhawatirkan segi pendanaan.

Faktor yang tampak cukup menjadi masalah adalah kondisi ekonomi para guru dan tenaga kependidikan itu sendiri. Walaupun fasilitas tugas belajar menjanjikan bantuan penuh, dan fasilitas izin belajar juga memberikan dukungan

dana, tetapi tidak banyak guru yang mengikutinya. Mereka tetap mengkhawatirkan akan banyak dana yang harus dikeluarkan dari kantong sendiri. Lebih-lebih bagi guru-guru yang sudah lulus sertifikasi, yang karena gajinya relatif besar diminta agar membiayai sendiri pendidikan lanjutannya (S 2). Di samping itu mereka juga merasa bahwa tanggung jawab keluarga, misalnya membiayai anak sekolah/kuliah lebih penting daripada meningkatkan pendidikan orangtuanya. Karena itu dapat dipastikan kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendidikan S2 dengan biaya sendiri tidak akan optimal.

Apalagi, di pihak guru-guru dan tenaga kependidikan ada beberapa faktor yang kelihatannya kurang mendukung, seperti faktor geografis (jauh dari kota), faktor kamauan dan kemampuan yang menurun disebabkan usia yang sudah relatif tua, mendekati pensiun, kesehatan fisik yang menurun, daya ingat, konsentrasi belajar dan kemampuan dalam menyerap pelajaran dan mengerjakan tugas-tugas perkuliahan yang juga menurun. Semua ini memang kurang mendukung jika ingin mewujudkan peningkatan pendidikan yang lebih berkualitas.

Oleh karena itu kebijakan pemerintah kabupaten Barito Kuala untuk pengembangan SDM guru ini sebaiknya lebih bersifat sukarela untuk kalangan tertentu, dan bersifat wajib untuk kalangan tertentu. Bersifat sukarela misalnya untuk guru-guru senior yang di segi usia sudah kurang memungkinkan. Bagi mereka ini dapat dicarikan solusinya dengan memperbanyak pendidikan dan pelatihan (diklat) jangka pendek, misalnya diklat PTK, PTS, PAIKEM dan sebagainya. Bersifat wajib bagi guru-guru muda yang masih memungkinkan untuk mengembangkan kariernya.

Mereka ini penting sekali didorong agar terus meningkatkan pendidikannya, disertai harapan jenjang karier yang baik pula.

Mengingat pendidikan lanjutan untuk S2 memerlukan biaya yang tidak sedikit, maka seyogyanya pemerintah daerah menyanggah biayanya secara penuh, baik bagi guru (mahasiswa) tugas belajar maupun izin belajar. Bedanya, bagi yang izin belajar tetap mengerjakan tugas dinas. Dengan begitu akan banyak guru dan tenaga kependidikan yang tertarik untuk menempuh pendidikan S2. Termasuk guru-guru yang sudah lulus sertifikasi pun diberikan biaya dimaksud, sebab gaji mereka yang dianggap sudah besar sifatnya relatif. Bisa saja biaya hidup keluarganya juga besar, apalagi pencairan gaji sertifikasi tidak selalu setiap bulan, bahkan kadang menumpuk berbulan-bulan.

Menurunnya kesehatan fisik, daya ingat, kemampuan mengikuti pelajaran sifatnya relatif, hal itu banyak juga tergantung kepada niat, semangat dan motivasi guru itu sendiri, termasuk motivasi eksternal dari pihak kepala sekolah, dinas pendidikan, keluarga dan lingkungan. Jika hal ini mendukung bisa saja usia tua masih potensial untuk menempuh pendidikan lanjutan, mengingat pendidikan tidak mengenal batas usia.

Bagi guru-guru dan tenaga kependidikan memang harus berupaya memotivasi dirinya sendiri. Pemerintah telah menyediakan anggaran pendidikan yang semakin besar jauh di atas anggaran sektor lain. Kesejahteraan guru pun semakin diperhatikan dengan banyaknya tunjangan dan fasilitas yang diberikan. Kalau hal ini tidak dibarengi dengan semangat untuk maju di kalangan guru-guru dan tenaga

kependidikan, maka semua itu akan sia-sia, minimal tidak mendapai hasil yang optimal. Keinginan meningkatkan kualitas bangsa melalui pendidikan tidak akan tercapai.